

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Tiara Monika Antoni¹, Daisy S.M. Engka², Hanly F. Dj. Siwu³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115. Indonesia

E-mail: monikaantoni305@gmail.com

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah menjadi hal yang penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda dan data sekunder berupa data tahunan jumlah penduduk, PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara selama periode tertentu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, variabel produk domestik regional bruto (PDRB) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, sedangkan peningkatan PDRB belum sepenuhnya terefleksi dalam peningkatan pendapatan pajak.

Kata kunci : Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Eenerimaan Pajak Daerah, Sulawesi Utara.

ABSTRACT

Regional taxes are one of the main sources of local revenue that play an important role in supporting regional economic development. Therefore, understanding the factors that influence regional tax revenue is essential for local governments in formulating effective fiscal policies. This study aims to analyze the influence of population, gross regional domestic product (GRDP), and economic growth on regional tax revenue in North Sulawesi Province. The study employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis and secondary data, consisting of annual data on population, GRDP, economic growth, and regional tax revenue in North Sulawesi Province for a certain period obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of North Sulawesi Province. The results of the study show that the variables of population and economic growth have a positive and significant effect on regional tax revenue in North Sulawesi Province. Meanwhile, the gross regional domestic product (GRDP) variable has a positive but not significant effect on regional tax revenue. These findings indicate that an increase in population and the rate of economic growth can encourage higher regional tax revenue, whereas an increase in GRDP has not been fully reflected in the growth of tax revenue.

Keywords : Population, Gross Regional Domestic Product, Economic Growth, Regional Tax Revenue, North Sulawesi.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, ditandai dengan meningkatnya aktivitas di berbagai sektor seperti industri, perdagangan, jasa, dan investasi. Pertumbuhan ekonomi nasional ini turut mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, peran penerimaan pajak sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan penerimaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, di antaranya jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang terus bertambah dapat memperluas basis pajak, (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB yang meningkat menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin produktif, sementara pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi indikator meningkatnya daya beli dan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses peningkatan pendapatan per kapita secara optimal dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, perubahan struktur ekonomi, dan pemerataan pendapatan (Rapanna & Sukarno, 2017). Keberhasilan pembangunan tersebut penting untuk naiknya pertumbuhan ekonomi. Hal terpenting yang mencakup semua kebutuhan masyarakat daerah tersebut yaitu adanya hasil pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itulah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah juga untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah tertinggi berasal dari pendapatan pajak daerah.

Sistem perekonomian negara memberi ruang yang cukup luas bagi daerahnya untuk menerapkan otonominya. Otonomi daerah sendiri merupakan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mereka dapat mengatur dan mengurus kepentingan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pengembangan daerahnya. Tujuan utamanya meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, kemandirian daerah, partisipasi warga dalam pembangunan, serta peningkatan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. di sisi lain, pengembangan daerah juga bertujuan menajamkan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional (Madiasmo, 2022). Sumber penerimaan pendapatan asli daerah terbesar ialah pajak daerah. Pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD yang dimana menjadi penerimaan yang akan bisa pemerintah lakukan pembangunan daerah. Apalagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi utara adalah salah satu provinsi termaju dikawasan timur Indonesia.

Tabel 1 . Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2024 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)
2010	Rp.372.306.849
2011	Rp.477.202.210
2012	Rp.554.846.120
2013	Rp.667.921.445
2014	Rp.785.193.172
2015	Rp.837.020.757
2016	Rp.838.345.526
2017	Rp.983.700.685
2018	Rp.1.052.296,155
2019	Rp.1.050.089,444
2020	Rp.898.701.050
2021	Rp.1.075.616,467
2022	Rp.1.214.292,047
2023	Rp1.186.354,255
2024	Rp.1.236.000,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2025

Berdasarkan tabel 1, realisasi penerimaan pajak daerah diatas menunjukkan adanya tren kenaikan pendapatan pajak daerah yang berkelanjutan selama periode 2010 hingga 2024. Peningkatan ini terbilang

sangat signifikan, yakni lebih dari tiga kali lipat, dari Rp 372 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 1,236 triliun pada tahun 2024. Meskipun demikian, sempat terjadi penurunan tajam pada tahun 2020 yang diyakini sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Akan tetapi, penerimaan pajak berhasil pulih dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya, bahkan mampu melampaui perolehan sebelum pandemi.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk juga salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk adalah total keseluruhan orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah ini penting karena memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti kebutuhan ekonomi, pembangunan, pelayanan publik, serta potensi penerimaan pajak. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Contohnya, jika lebih banyak orang yang menjalankan usaha, seperti membuka warung, toko, atau berbagai jenis jasa lainnya. Hal ini tentu menambah objek pajak seperti pajak restoran, hiburan, dan reklame. Belum lagi peningkatan kepemilikan lahan atau pembangunan rumah yang berdampak langsung pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat, dan penerimaan pajak menjadi sangat erat. Ketika perekonomian suatu wilayah berkembang, maka aktivitas produksi dan konsumsi akan meningkat, sehingga perputaran uang dalam masyarakat juga lebih besar. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh penerimaan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk, maka potensi penerimaan pajak daerah pun semakin besar.

Bertambahnya jumlah penduduk juga bisa mendorong aktivitas ekonomi daerah jadi lebih hidup. Permintaan terhadap barang dan jasa naik, sehingga perputaran ekonomi jadi lebih lancar. Kondisi ini memberi pengaruh positif pada penerimaan pajak karena hampir semua kegiatan ekonomi berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Artinya, semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan pendapatan pajak. Namun, semua itu perlu didukung oleh sistem pemungutan yang tertata, pelayanan publik yang optimal, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Singkatnya, pertumbuhan penduduk bisa jadi aset penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak, asal dikelola dengan kebijakan yang tepat dan perencanaan yang matang.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga tidak lepas dari dampak meningkatnya aktivitas ekonomi. Seiring dengan meningkatnya standar hidup masyarakat maka golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan semakin meningkat juga, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan sektor-sektor pajak daerah ada dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (Shiska dan Nizaruddin: 2009).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa dibilang adalah jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Jadi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menggambarkan seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Contohnya, jika suatu daerah punya berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, industri, hingga jasa, maka seluruh hasil dari sektor-sektor itu dihitung dan dijumlahkan menjadi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) penting karena bisa menunjukkan apakah perekonomian di daerah itu sedang berkembang atau justru mengalami penurunan. Kalau angkanya naik tiap tahun, berarti kondisi ekonominya cenderung membaik. Tapi kalau menurun, bisa jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Biasanya, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini juga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk merancang kebijakan pembangunan, atau untuk melihat perbandingan ekonomi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi proses meningkatnya kapasitas produksi suatu negara atau daerah yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau output nasional dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ini mencerminkan kemajuan ekonomi yang diukur secara kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama yang menunjukkan kemajuan pembangunan suatu negara atau daerah. Lewat pertumbuhan ekonomi, kita bisa melihat bagaimana

kondisi ekonomi berubah dari waktu ke waktu. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan hasil produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Peningkatan ini terjadi secara bertahap dan berkelanjutan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus berkembang. Tidak selalu harus lebih besar dari pertumbuhan penduduk, yang penting ada kenaikan dalam total output, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kalau angka pertumbuhannya naik tiap tahun, itu tandanya roda ekonomi terus berputar dan masyarakat makin aktif dalam kegiatan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi bisa jadi cerminan arah dan kualitas perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Berikut di sajikan realisasi Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2010 – 2024.

Tabel 2. Realisasi Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2024 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010	2.270.596	Rp.36.911.815	7,12
2011	2.296.666	Rp. 41.505.118	7,39
2012	2.319.916	Rp. 47.188.304	7,86
2013	2.343.527	Rp. 53.401.101	7,45
2014	2.386.604	Rp. 80.622.829	6,31
2015	2.412.118	Rp. 91.275.260	6,12
2016	2.436.900	Rp. 100.537.360	6,17
2017	2.461.000	Rp. 110.164.480	6,31
2018	2.464.400	Rp. 119.512.680	6.01
2019	2.507.000	Rp. 130.126.510	5,66
2020	2.621.900	Rp. 132.230.060	-0,99
2021	2.638.631	Rp. 142.615.020	4,16
2022	2.659.540	Rp. 157.028.360	5,42
2023	2.660.780	Rp. 171.969.420	5,48
2024	2.701.780	Rp. 187.374.000	5,39

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, 2025

Berdasarkan tabel 2, realisasi tabel menunjukkan bahwa selama periode 2010 hingga 2024, jumlah penduduk mengalami peningkatan stabil dari sekitar 2,27 juta menjadi 2,70 juta jiwa yang mencerminkan pertumbuhan demografis yang konsisten. Seiring dengan itu, nilai PDRB juga meningkat signifikan dari Rp36.911 miliar menjadi Rp187.374 miliar, menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi yang pesat. Namun, laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, dengan angka tinggi di atas 7% pada awal periode, melambat ke kisaran 5–6% pada tahun-tahun berikutnya, dan sempat terkontraksi sebesar -0,99% pada 2020 akibat dampak Pandemi COVID-19. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi mulai pulih secara bertahap pada 2021–2024 meskipun belum kembali ke level tertinggi seperti awal dekade. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan kenaikan PDRB menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi diperlukan strategi dan kebijakan ekonomi yang adaptif untuk menjaga laju pertumbuhan tetap stabil.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara?
4. Apakah Jumlah Penduduk , Produk Domestik Regional Bruto , dan Pertumbuhan Ekonomi secara Bersama – sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak Di Provinsi Sulawesi Utara?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Perpajakan

Dalam memahami kebijakan perpajakan beserta dampaknya terhadap masyarakat maupun negara, terdapat berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli sebagai landasan berpikir. Teori-teori ini memberikan gambaran mengenai cara yang adil dan efektif dalam memungut serta mendistribusikan pajak.

2.2 Teori Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Theory*)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Seligman. Pokok pemikirannya adalah bahwa pajak harus dibebankan berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi masing-masing individu. Semakin tinggi pendapatan atau kekayaan seseorang, maka semakin besar pula kewajiban perpajakannya. Konsep ini dianggap mewakili asas keadilan karena tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.

2.3 Teori Asas Manfaat (*Benefit Theory*)

Teori yang dikembangkan oleh Erik Lindahl ini menyatakan bahwa pembayaran pajak merupakan imbal balik atas manfaat yang diterima masyarakat dari pelayanan publik. Artinya, setiap orang membayar pajak sebanding dengan sejauh mana mereka memperoleh manfaat dari fasilitas yang disediakan negara. Teori ini menitikberatkan pada prinsip timbal balik antara warga negara dan pemerintah.

2.4 Teori Pengorbanan Sama (*Equal Sacrifice Theory*)

Menurut John Stuart Mill, sistem perpajakan harus dirancang agar setiap warga negara menanggung beban yang seimbang dalam bentuk pengorbanan, baik dalam arti absolut maupun proporsional. Tujuan utama dari teori ini adalah menciptakan keadilan dalam pembagian beban pajak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara berlebihan.

2.5 Teori Kapasitas Ekonomi (*Economic Capacity Theory*)

Musgrave dan Musgrave menjelaskan bahwa kemampuan membayar pajak harus dilihat dari keseluruhan kapasitas ekonomi individu, bukan hanya dari pendapatan yang diterima. Hal ini mencakup juga harta kekayaan dan tingkat konsumsi. Teori ini mendukung pentingnya distribusi beban pajak yang adil dan proporsional berdasarkan kekuatan ekonomi masing-masing orang.

2.6 Teori Pajak Modern

Menurut pandangan Richard A. Musgrave, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengelola perekonomian. Pajak berperan dalam menstabilkan kondisi ekonomi, memperbaiki distribusi pendapatan, dan mengatur alokasi sumber daya. Dengan demikian, pajak menjadi alat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Mandey, D. R., Engka, D. S. M., Siwu, H. F.Dj. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series periode 2004-2021 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Kepulauan Talaud dan BPS Provinsi Sulawesi Utara. Data diolah menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program EViews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan, RLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Secara simultan PDRB, RLS, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kunenengan, R. M. A., Engka, D. S. M., Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota Di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, terhadap ketimpangan pendapatan di 5 Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Raya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) dengan periode waktu 2016-2020. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis yaitu eviews 12. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan secara bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 5 Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Raya.

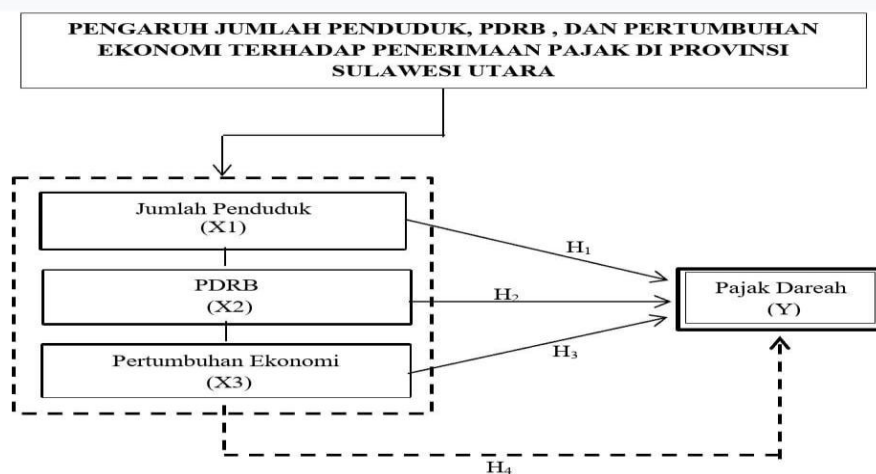
Simbaulu, R. A., Rotinsulu, T. O., Lopian, A. L. Ch. P. (2022). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, upah minimum dan inflasi terhadap pengangguran di Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota Manado dan BPS Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini menggunakan model analisa Regresi Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, upah minimum dan inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Secara simultan jumlah penduduk, upah minimum dan inflasi berpengaruh terhadap pengangguran.

Sondakh, L., Lopian, A. L. Ch. P., Masloman, I. (2024). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Pengaruh Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja Dsn Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, angkatan kerja dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara, pengaruh jumlah penduduk secara parsial terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara, pengaruh angkatan kerja secara parsial terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara dan pengaruh tingkat pendidikan secara parsial terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : secara Simultan jumlah penduduk, angkatan kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara, secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara, secara parsial angkatan kerja positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara dan secara parsial tingkat Pendidikan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara.

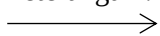
2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis

Alur pemikiran ilmiah berdasarkan teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui skema berikut :

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan :



: Pengaruh Secara Parsial



: Pengaruh Secara Simultan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data Dan Sumber Data

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah wilayah Sulawesi Utara, dan yang menjadi focus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk waktu penelitian dimulai dari bulan April 2025.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana pada pendekatan ini menjabarkan permasalahan serta di analisis berupa angka mulai dari pengumpulan penafisan sampai mendapatkan hasil akhir. Penelitian kuantitatif diperlukan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan atas hasil penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data sebagai berikut :

1. Data Pajak Daerah yang diambil dari data yang terpublikasi dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara dalam angka Tahun 2010-2024.
2. Data Jumlah Penduduk yang di ambil dari data yang terpublikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka pada tahun 2010-2024.
3. Data Produk Domestik Regional Bruto diambil dari data publikaksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka pada tahun 2010-2024.
4. Data Pertumbuhan Ekonomi diambil dari data publikaksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka pada tahun 2010-2024.

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini Pajak Daerah (Y) digunakan sebagai variabel dependen yang menggunakan tipe variabel yang di jelaskan atau di pengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Jumlah Penduduk (X1), PDRB (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3). Adapun defisini operasional variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pajak (P) adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan umum (undang - undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, yang diukur dalam satuan persen.
2. Jumlah Penduduk (JP) adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi adalah fertilitas, mortalitas, dan migrasi, yang diukur dalam satuan persen.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator dari perekonomian suatu daerah (Kairupan, 2013), yang diukur dalam satuan persen.
4. Pertumbuhan ekonomi (PE) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun, yang diukur dalam satuan persen.

3.5 Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Regresi berganda merupakan cara untuk mengetahui arah dan besar pengaruh dari variabel yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel terikat (Purwanto,2019). Penelitian ini menggunakan pajak sebagai variabel dependen dan jumlah penduduk,pdrb, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variaabel independen. Adapun bentuk fungsional dapat dilihat dibawah ini.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pajak Daerah

X1 = Jumlah Penduduk

X_2 = Produk Domestik Regional Bruto
 X_3 = Pertumbuhan Ekonomi
 α = Konstanta
 $\beta - \beta_4$ = Koefisien Regresi Masing – Masing Variabel Independen
 ε = Error

3.5.1 Uji Statistik

3.5.1.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah hipotesis mengenai koefisien regresi individual. Pengajuan ini menentukan apakah H_0 (Hipotesis nol) diterima atau tidak. Hipotesis nol dinyatakan menempatkan posisi yang menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara variabel dependen dan independen. Pengambilan keputusan hasil dari uji t tergantung dari nilai p atau probabilitas lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan nilai α yang sudah ditentukan.. Jika nilai $p > \alpha$ maka hipotesis nol diterima yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai $p < \alpha$ maka hipotesis nol ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.1.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau uji ANOVA merupakan pengujian signifikansi dari seluruh regresi sampel atau pengujian hipotesis secara bersama. Pengambilan keputusan dilihat dari nilai probabilitas F – statistic yang dimana akan dibandingkan dengan nilai α yang sudah ditentukan. Jika nilai probabilitas F – statistic $> \alpha$ maka hipotesis nol diterima yang berarti secara bersama - sama variabel independen yang ada tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai probabilitas F – statistic $< \alpha$ maka hipotesis nol ditolak yang berarti secara bersama - sama variabel independen yang ada berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang cocok dengan data yang ada (Widarjono, 2016). Nilai dari uji R^2 ini memiliki batasan yaitu $0 \leq R^2 \leq 1$, yang dimana semakin mendekati angka 1 semakin besar kemampuan variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen dan begitu juga sebaliknya, jika nilainya mendekati angka 0 maka antara kedua variabel tersebut tidak ada hubungannya (Gujarati, 2011).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Widarjono (2013) metode OLS harus memenuhi asumsi – asumsi tertentu yaitu menghasilkan estimator linier tidak bias dengan varian yang minimum *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi *linier ordinary least square* (OLS) terdapat masalah asumsi klasik. Dalam penelitian menggunakan empat Uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun nilai residual yang dihasilkan terdistribusi normal atau tidak. Uji statistik yang digunakan untuk menilai normalitas dalam penelitian ini yaitu Uji Jarque Bera (JB). Untuk melihat apakah regresi data normal berdistribusi normal atau tidak yaitu jika nilai probabilitas jarque Bera (JB) hitung lebih besar dari tingkat kesalahan α = tingkat 5%, maka nilai residual berdistribusi normal dan sebaliknya jika kesalahan probabilitas Jarque Bera (JB) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Apabila hasil dari proses meregres masing – masing variabel independen dengan variabel independen yang lain tersebut menunjukkan adanya nilai R^2 yang lebih dari R^2 model utama, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas dalam model maka digunakan metode *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka

disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang destimasi terhadap variable – variabel penjelas. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini yaitu apabila nilai probability Obs R squared > taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas (homoskedastisitas).

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Bbreusch-Godfrey secara umum dikenal dengan uji *Lagrange-Multiplier* (LM-test) dengan ketentuan apabila nilai probabilitas 0.05, maka dalam model regresi tidak ada gejala autokorelasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1 Hasil Estimasi Regresi

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/13/25 Time: 16:52 Sample (adjusted): 2011 2024 Included observations: 12 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.791476	4.460064	1.522731	0.1663
D(X1)	2.725430	1.079531	2.524641	0.0356
D(X2)	0.011835	0.099457	0.118993	0.9082
X3	1.288430	0.659917	1.952412	0.0867
R-squared	0.501345	Mean dependent var		17.70083
Adjusted R-squared	0.314350	S.D. dependent var		3.310840
S.E. of regression	2.741508	Akaike info criterion		5.116095
Sum squared resid	60.12694	Schwarz criterion		5.277731
Log likelihood	-26.69657	Hannan-Quinn criter.		5.056252
F-statistic	2.681055	Durbin-Watson stat		1.280005
Prob(F-statistic)	0.117712			

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Berdasarkan Tabel 3, hasil model estimasi OLS regresi dalam penelitian ini diestimasi sebagai berikut.

$$\text{LnY} = 2.725430\text{LnDX1} + 0.011835\text{LnDX2} + 1.288430\text{LnX3} + 0.498655\text{E}$$

Persamaan regresi linier berganda sebelumnya dapat di tafsirkan sebagai berikut.

- Pada persamaan diatas, konstanta persamaan regresi linier berganda adalah 6.791476 dan bertanda positif. Ini menunjukkan bahwa jika nilai X1, X2 dan X3 adalah 0, maka pajak daerah adalah 6.791476.
- Koefisien regresi untuk variabel Jumlah Penduduk (X1) adalah sebesar 2.725430. Ini menjelaskan bahwa dengan setiap peningkatan satu jiwa pada jumlah penduduk, pajak daerah akan meningkat sebesar 2.725430, sementara PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di asumsikan tetap.
- Koefisien regresi untuk variabel PDRB (X2) adalah sebesar 0.011835. Yang menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebesar 1 Miliar sementara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi diasumsikan tetap, makapajak daerah akan meningkat sebesar 0.011835.
- Koefisien regresi untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) adalah sebesar 1.288430, yang menunjukkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% sementara jumlah penduduk dan PDRB diasumsikan tetap, maka pajak daerah akan meningkat sebesar 1.288430.

4.1.2 Uji Statistik

Dalam studi, proses pengujian statistic melibatkan pengambilan keputusan tentang pertanyaan yang diajukan tentang seluruh populasi. Dalam pengujian hipotesis, peneliti menganalisis data untuk menentukan apakah asumsi yang diajukkan dapat dipercaya.

4.1.2.1 Uji Parsial (t)

Untuk mengetahui pengaruh variabel Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara secara

parsial yang merujuk pada nilai probabilitas yang dihasilkan dari pengolahan data melalui software Eviews 12.

- Jika nilai prob. < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Jika nilai prob. > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil perhitungan uji parsial dalam penelitian ini berdasarkan hasil dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Tabel 4 : Hasil Analisis Uji Parsial

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	prob	Kesimpulan
LnX1	2..725430	1.079531	2.524641	0.0356	Signifikan
LnX2	0.011835	0.099457	0.118993	0.9082	Tidak Signifikan
LnX3	1.288430	0.659917	1.952412	0.0867	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Berdasarkan perhitungan menggunakan Eviews 12, nilai t yang tercatat pada kolom t-Statistic memiliki derajat kebebasan (df) sebanyak $n - k$ atau $14 - 3 - 1 = 10$. Dengan mengacu pada nilai t-tabel sesuai dengan kriteria ini jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara dapat di jelaskan sebagai berikut.

- Nilai t tabel sebesar 1.812 adalah nilai yang lebih kecil daripada nilai t variabel jumlah penduduk (X1) sebesar 2.524641. Nilai t tabel ini diperoleh dari melihat tabel t untuk derajat kebebasan pada level 0.05 hingga 0.10 dan dengan jumlah variabel $14 - 3 - 1 = 10$, tingkat signifikansi menunjukkan nilai yang lebih rendah dari Alpha (0,05), yaitu 0,0356. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan yang besar terhadap pajak daerah.
- Nilai t tabel adalah 1.812, yang lebih besar daripada nilai t yang dihitung untuk variabel PDRB (X2) sebesar 0.118993. Nilai t tabel ini diperoleh dengan mengamati tabel t sesuai dengan df pada tingkat 0.05 – 0.10 dan dengan jumlah variabel $14 - 3 - 1 = 10$. Meskipun demikian, tingkat signifikansi menunjukkan nilai yang lebih besar dari Alpha (0,05), yaitu 0.9082 . Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak memengaruhi pajak daerah secara signifikan.
- Nilai t tabel adalah 1.812, yang lebih kecil daripada nilai t yang dihitung untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1.952412. Nilai t tabel ini diperoleh dengan mengamati tabel t sesuai dengan df pada tingkat 0.05 – 0.10 dan dengan jumlah variabel $14 - 3 - 1 = 10$.. Meskipun demikian, tingkat signifikansi menunjukkan nilai yang lebih besar dari Alpha (0,05), yaitu, yaitu 0.0867. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa variabel. Pertumbuhan Ekonomi tidak memengaruhi pajak daerah secara signifikan.

4.1.2.2 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan data dari Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama, variabel jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa nilai F-Statistic mencapai 2.681055, melebihi nilai F-tabel sebesar 3.411 pada tingkat signifikansi $0.117712 < 0.01$. Oleh sebab itu H_0 ditolak H_1 diterima. Penelitian ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama – sama berdampak signifikan pada penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

4.1.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Tabel 4.4, terlihat bahwa nilai R squared mencapai 0.501345. Hal ini menunjukan bahwa 50.1% dari variasi dalam penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, 49, 9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

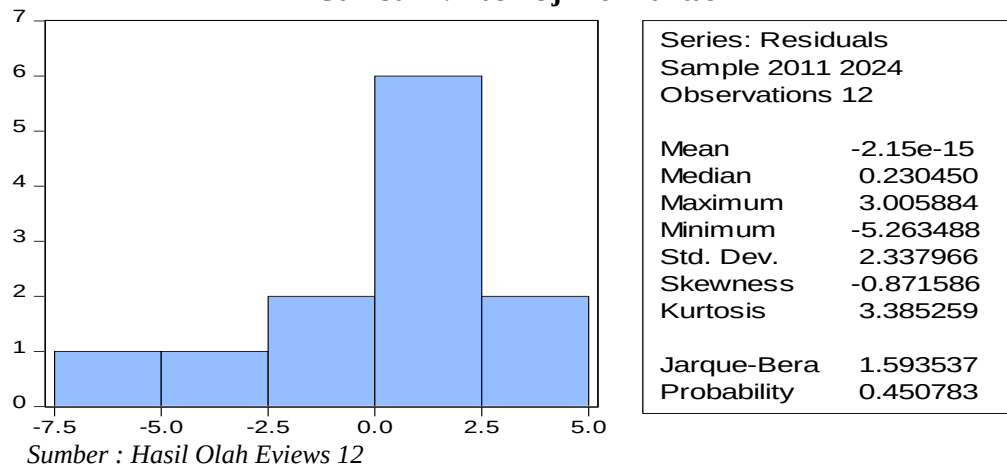
4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah distribusi variabel dependen dan independen dalam model regresi linear mendekati distribusi normal. Asumsi normalitas merupakan salah satu syarat penting

dalam model regresi linear. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Jarque-Bera.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan hasil pada gambar 2, disimpulkan bahwa nilai probabilitas Jarque Bera 0.450783 dimana lebih tinggi dari tingkat signifikan 0.05. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini, disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal.

4.1.4.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mendeteksi keberadaan hubungan linier yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi berganda. Model regresi yang baik idealnya tidak menunjukkan adanya korelasi tinggi antara variabel-variabel bebasnya (Ghozali, 2013). Untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas dalam model regresi, hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 10/13/25 Time: 17:25
Sample: 2010 2024
Included observations: 12

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	19.89217	31.76028	NA
D(X1)	1.165388	6.202281	2.894398
D(X2)	0.009892	3.737758	1.399904
X3	0.435491	24.68446	3.382652

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

Berdasarkan hasil pada Tabel 6 di atas, disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang terkait dengan variabel bebas. Hal ini dapat dilihat dari nilai Contered VIF (*Variance Inflation Factors*) dari ketiga variabel independent yang kurang dari 10. Oleh sebab itu, hasil regresi tidak dipengaruhi oleh masalah multikolinearitas.

4.1.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketergantungan antara residual dalam suatu model regresi. Ketika autokorelasi terjadi, berarti nilai gangguan pada suatu pengamatan tidak lagi independen dari gangguan pada pengamatan sebelumnya. Hal ini menyiratkan adanya pola atau tren tertentu dalam data yang perlu diperhatikan.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	0.379088	Prob. F(2,6)	0.6998
Obs*R-squared	1.346237	Prob. Chi-Square(2)	0.5101

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

Pada Tabel 7, disajikan data hasil pengujian autokorelasi, dimana nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.5101. Probabilitas ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ ($0.06 > 0.05$), menunjukkan tidak ada indikasi autokorelasi.

4.1.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas mengacu pada kondisi di mana penyimpangan data dari model regresi tidak konsisten. Jika terjadi heteroskedastisitas, maka uji statistik yang kita gunakan untuk menguji signifikansi parameter model dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa model regresi kita memenuhi asumsi homokedastisitas. Berikut ini merupakan kriteria yang diterapkan dalam uji Glejser adalah sebagai berikut.

- Jika nilai Probabilitas Chi Square kurang dari 0.05, maka disimpulkan bahwa terindikasi adanya masalah heteroskedastisitas.
- Jika nilai Probabilitas Chi Square lebih dari 0.05, maka disimpulkan bahwa tidak terindikasi adanya masalah heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.656668	Prob. F(3,8)	0.6012
Obs*R-squared	2.371118	Prob. Chi-Square(3)	0.4990
Scaled explained SS	2.044172	Prob. Chi-Square(3)	0.5633

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

Dari data yang tercantum dalam Tabel 4.8 di atas, Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square melebihi tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ ($0.4990 > 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.2 Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang Diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian di olah menggunakan aplikasi Eviews 12, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel independen X1 (Jumlah Penduduk), X2 (Produk Domestik Regional Bruto), X3 (Pertumbuhan Ekonomi) secara bersama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap variabel Y (Pajak Daerah). Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel jumlah penduduk memiliki koefisien regresi positif dan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Jumlah penduduk akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak daerah, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Secara ekonomis, hasil ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, yang kemudian berdampak pada meningkatnya objek pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, serta pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula potensi pendapatan daerah yang dapat digali melalui pajak.

Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi publik yang menyatakan bahwa penduduk merupakan basis utama dalam penerimaan pajak daerah, karena penduduk berperan sebagai wajib pajak sekaligus pengguna barang dan jasa yang menjadi objek pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [misalnya: Rahmawati (2021)] dan [Tumbelaka (2022)], yang menemukan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di beberapa provinsi di Indonesia. Dari sisi empiris, kondisi Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang relatif stabil selama periode penelitian. Berdasarkan data BPS, peningkatan jumlah penduduk disertai dengan meningkatnya jumlah wajib pajak aktif, khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran yang berkontribusi besar terhadap total penerimaan pajak daerah. Hal ini memperkuat temuan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin besar potensi pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah

penduduk merupakan salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi tersebut melalui pendataan wajib pajak yang lebih akurat serta perluasan basis pajak agar peningkatan jumlah penduduk benar-benar dapat diikuti dengan peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

4.2.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan koefisien positif, namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti bahwa meskipun arah hubungannya sejalan — di mana peningkatan PDRB cenderung diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak daerah — namun pengaruhnya secara statistik belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan pada tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini.

Secara teoritis, Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi daerah yang mencakup seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto seharusnya menunjukkan meningkatnya kegiatan produksi dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara belum sepenuhnya mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan. Ada beberapa kemungkinan penyebab dari kondisi ini. Pertama, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Utara mungkin lebih banyak didorong oleh sektor-sektor yang tidak menjadi objek pajak daerah secara langsung, seperti sektor pertanian atau industri pengolahan berskala besar yang lebih banyak memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah pusat. Kedua, masih terdapat tingkat kepatuhan pajak yang rendah dan optimalisasi pemungutan pajak daerah yang belum maksimal, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta tercermin dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Selain itu, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto belum tentu mencerminkan pemerataan pendapatan masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka daya beli masyarakat secara umum tidak meningkat secara merata, dan potensi pajak dari konsumsi atau kepemilikan aset tetap terbatas. Dengan demikian, meskipun Produk Domestik Regional Bruto meningkat, kontribusinya terhadap pajak daerah tetap relatif kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh [misalnya: Sari (2020)] dan [Pontoh (2022)], yang juga menemukan hubungan positif namun tidak signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto dan penerimaan pajak daerah di beberapa provinsi lain di Indonesia. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Utara belum secara signifikan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah, meskipun hubungan keduanya bersifat positif. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengarahkan kebijakan ekonomi agar pertumbuhan sektor-sektor produktif yang menjadi basis pajak daerah dapat ditingkatkan, serta memperkuat sistem pemungutan pajak agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal bagi pendapatan asli daerah.

4.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode penelitian memang sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi, tetapi belum cukup kuat untuk memberikan dorongan nyata terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Dengan kata lain, arah hubungan telah sesuai dengan teori, namun besarnya pengaruh belum mampu menghasilkan perubahan yang berarti pada pendapatan pajak daerah.

Ketidaksigifikanan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya struktur perekonomian Sulawesi Utara yang masih didominasi oleh sektor-sektor dengan kontribusi pajak daerah yang relatif kecil, seperti pertanian dan sektor informal. Pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut lebih banyak mendorong output ekonomi secara agregat, tetapi tidak berbanding lurus dengan peningkatan potensi pajak daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi mungkin belum diikuti oleh optimalisasi

pemungutan pajak, sehingga potensi tambahan penerimaan belum sepenuhnya tertangkap oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, meskipun terdapat kecenderungan bahwa pertumbuhan ekonomi bergerak searah dengan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi pajak tinggi dan memperkuat sistem pemungutan pajak. Upaya seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak serta perluasan basis pajak perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara, dan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik.
2. Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara, tetapi memiliki hubungan yang tidak signifikan secara statistik.
3. Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara, tetapi memiliki hubungan yang tidak signifikan secara statistik.
4. Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2010–2024. *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka*. Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/ Kota.

Idham, Nurfajriyati, Een N. Walewangko, and Hanly F. Dj Siwu. "Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Tidore kepulauan dan kota Ternate (2010-2019)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9.3 (2021).

Mardiasmo. 2022. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi.

Shiska, Ery, and Abu Nizaruddin. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Pangkalpinang Tahun 2005-2009." *Journal of Accountancy* 1.1 (2013).

Sulawesi Utara Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara (KATALOG : 1102001.71).

Susila, M. R., Pradhani, F. A. Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi.

Syaputri, A. G. G., Ulum, M. B. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Pagalaram, Prabumulih, Dan Lubuk Linggau.

Talondong, S., Morasa, J., Tanngkuman. S. J. Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi.

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2015. *Economic Development*. New York: Pearson Education.